

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENAJMEN KURIKULUM DAN SPMI DI SMAN 2 MATARAM

Adrian Saputra¹, Aulia Nopriani²

e1b02410106@student.unram.ac.id¹, aulianopriani28@gmail.com²

Universitas Mataram

ABSTRAK

Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Disisi lain, sekolah wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar Standar Nasional Pendidikan tetap terpenuhi. Pengamatn ini menganalisis bagaimana kurikulum merdeka diintegrasikan ke dalam menajmen kurikulum sekolah dan SPMI. Metode penelitian adalah studi Pustaka menggunakan artikel dan jurnal serta wawancara dengan guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapam kurikulum merdeka membutuhkan pengelolaan kurikulum secara sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sehingga tujuan Pendidikan tetap tercapai. SPMI menjadi mekanisme berkelanjutan terhadap kebijakan kurikulum. SPMI dilaksanakan dalam siklus penetapan, implementasi, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang mendukung sekolah dalam menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan standar Nasional. Implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan kesiapan guru; ketersediaan sumber daya memadai dan kemudahan pemahaman kurikulum menjadi pendukung utama, sedangkan minimnya pengetahuan guru merupakan kendala. Dengan penguatan menajmen kurikulum merdeka di sekolah dapat berjalan efektif sambil tetap memelihara mutu Pendidikan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Penjaminan Mutu Internal, Menajmen Kurikulum, Sekolah Menengah Atas.

ABSTRACT

The Independent Curriculum (Kurikulum Merdeka) grants schools freedom to tailor the curriculum to students' needs. However, schools must also implement an internal quality assurance system (SPMI) to ensure national education standards are met. This study examines how the Independent Curriculum is integrated into school curriculum management and SPMI. The research uses a literature study with a descriptive-analytic (qualitative) approach. Findings indicate that implementing the Independent Curriculum requires systematic curriculum management planning, organizing, execution, and evaluation to achieve educational goals. SPMI provides a continuous evaluation mechanism. SPMI is carried out in five cycles (planning, implementation, evaluation, control, and improvement), supporting schools in aligning the curriculum with national standards. Factors such as adequate resources and teacher readiness significantly influence implementation; available resources and curriculum comprehensibility facilitate success, whereas limited teacher understanding hinders it. By strengthening curriculum management and SPMI in tandem, implementing the Independent Curriculum can be effective while maintaining educational quality.

Keywords: Independent Curriculum. Internal Quality Assurance. Curriculum Menagment. High School.

PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan terbaru dalam pendidikan Indonesia yang memberikan otonomi bagi sekolah dan guru untuk mengelola kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Tujuan utamanya adalah “mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya”. Dengan fleksibilitas ini, tantangan baru muncul dalam manajemen kurikulum sekolah. Manajemen kurikulum didefinisikan sebagai “sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum”. Artinya, sekolah harus merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi

kurikulum secara terstruktur agar tujuan pendidikan tercapai.

Di sisi lain, Sekolah wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016. Permendikbud tersebut menegaskan bahwa SPMI bertujuan memastikan terpenuhinya standar pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan. Standar pendidikan nasional mencakup standar isi (kurikulum), proses, kompetensi lulusan, dan komponen lainnya. Dengan demikian, meski kurikulum lebih fleksibel, sekolah tetap harus memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai SNP melalui siklus penjaminan mutu. Pada praktiknya, SPMI dilaksanakan dalam lima tahapan utama: penetapan standar mutu, pelaksanaan kebijakan, evaluasi mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Pendekatan ini memaksa sekolah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap aspek manajemen, termasuk kurikulum.

Dengan kerangka tersebut, artikel ini membahas bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka di SMA perlu diintegrasikan dengan pengelolaan kurikulum yang baik dan SPMI. Hal ini penting karena studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh manajemen internal sekolah. Misalnya, pada SMAN 4 Singaraja ditemukan implementasi Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian tersebut melaporkan bahwa sumber daya yang memadai dan kemudahan pemahaman kurikulum merupakan faktor pendukung utama, sedangkan kendala utama adalah minimnya kemampuan guru dalam memahami isi kurikulum sehingga sulit menerapkannya. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya manajemen kurikulum yang meliputi pelatihan guru dan penyediaan sarana-prasarana agar kebijakan kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah (seperti Permendikbud), dan publikasi terkait Kurikulum Merdeka, manajemen kurikulum, serta SPMI. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konsep dan temuan terkini tentang pengelolaan kurikulum dan penjaminan mutu di era Kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan ini, penulis mengintegrasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut di tingkat SMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menuntut adaptasi dalam manajemen kurikulum. Pertama, sekolah diberi kebebasan untuk menyusun modul pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, manajemen kurikulum harus mengatur perencanaan kurikulum secara fleksibel namun tetap berbasiskan standar kompetensi nasional. Dalam konteks ini, manajemen kurikulum menjadi alat untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Kurikulum Merdeka memfokuskan materi esensial dan memberi ruang pendalaman, sehingga sekolah perlu mengkoordinasi perubahan dengan seluruh komponen (guru, siswa, orang tua) agar kurikulum dapat terlaksana secara optimal.

Kedua, SPMI berperan sebagai mekanisme pengawasan internal atas implementasi kurikulum baru. Dalam SPMI, setiap tahap kurikulum (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) menjadi bagian dari evaluasi diri sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud 28/2016, SPMI memastikan standar pendidikan terpenuhi secara

berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa ketika Kurikulum Merdeka diadopsi, sekolah tetap harus melaksanakan penilaian diri terkait standar isi dan proses. Siklus SPMI yang meliputi penetapan standar hingga tindakan perbaikan memungkinkan sekolah menyesuaikan implementasi kurikulum dengan hasil evaluasi. Hasil penelitian di SMAN 1 Jejangkit menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI secara sistematis (penetapan standar, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran dan kompetensi guru. Temuan ini memperkuat pentingnya SPMI dalam mendukung proses pembelajaran baru: SPMI membantu sekolah mengidentifikasi kekurangan dan menguatkan praktik pengajaran sesuai kurikulum Merdeka.

Ketiga, faktor sumber daya sekolah sangat mempengaruhi implementasi kurikulum dan SPMI. Dari studi Redana & Suprpta (2023) terungkap bahwa ketersediaan sumber daya memadai—misalnya fasilitas belajar dan bahan ajar—membantu pelaksanaan Kurikulum Merdeka berjalan lancar. Sebaliknya, kendala guru belum memahami kurikulum secara mendalam menghambatnya. Temuan tersebut sejalan dengan prinsip manajemen kurikulum yang menekankan pentingnya perencanaan dan pelatihan guru dalam setiap fase pembelajaran. Oleh karena itu, manajemen kurikulum dalam era Merdeka Belajar harus mencakup program pengembangan profesional guru agar visi kurikulum baru dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, administratif dan sistem informasi sekolah perlu ditata dengan baik untuk mendukung SPMI (misalnya pendokumentasian RPP dan hasil evaluasi).

Secara keseluruhan, integrasi Kurikulum Merdeka dengan SPMI di SMA membutuhkan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pelaksanaan siklus mutu secara disiplin. Pelaksanaan SPMI yang terstruktur memperkuat kredibilitas manajemen kurikulum baru dengan memonitor pencapaian standar mutu secara berkesinambungan. Dengan kombinasi manajemen kurikulum yang adaptif dan sistem penjaminan mutu yang memadai, sekolah dapat memastikan bahwa otonomi kurikulum tidak mengabaikan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Implementasi kurikulum merdeka di SMA membawa perubahan signifikan dalam manajemen kurikulum di sekolah. Kesimpulannya, penerapan kurikulum yang lebih fleksibel harus diiringi dengan pengelolaan kurikulum yang sistematis agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. SPMI berfungsi sebagai kerangka evaluasi berkelanjutan yang memastikan kurikulum baru memenuhi standar nasional. Faktor kunci keberhasilan termasuk kecukupan sumber daya sekolah serta kesiapan guru dalam memahami kurikulum. Oleh karena itu disarankan agar sekolah mengintensifkan pelatihan dan sosialisasi kurikulum merdeka kepada guru, serta memperkuat komunikasi dengan siswa maupun orang tua mengenai perubahan kurikulum. Sekolah juga perlu untuk mengoptimalkan administrasi SPMI, kurikulum merdeka dapat dilaksanakan dengan efektif sekaligus menjaga dan meningkatkan mutu Pendidikan di SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan S.Pd., M.Pd. (2025). Pemateri Studi Lapangan di SMAN 2 Mataram. Sabtu, 22 November 2025.
- Hofifah Indah, S., Nurhidayah, & Siti Nur Farida. (2024). Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar. *Jurnal As-Sunniyyah*, 4(1).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Ranisa, S., Suriansyah, A. & Purwanti, R. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) dalam meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah. *Jurnal Ilmiah Menajmen dan Kewirausahaan*, 4(2). 263-177.

Redana, D. N., & Suprpta, I. N. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 4 Singaraja. *Jurnal Locus (Pendidikan)*, 15(1).